

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.
- Abdul Wahab, Solichin. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James. Public Policy: A New Perspective. Dalam Sunggono, Bambang. 2004. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Anderson, James E. (2003). Public Policy: A Global Perspective. New York: Wadsworth
- Cahyadi, A. (2016). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. Journal The WINNERS, Vol. 4 No. 1, Maret 2003: 1-12.
- Dama, dkk. (2020). E-Purchasing sebagai Tata Cara Pembelian Barang dan Jasa. Dalam laporan penelitian mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, 1(2), 130-138. Diakses dari <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/download/19/20>
- Edwards III, George C. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fachruddin, I., & Fanani, I. (2023). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E purchasing (E-Purchasing) di Kabupaten Kediri. Jurnal Interaksi, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5349>.
- Grindle, M. S. (1980). Implementation: The Missing Link Between Politics and Policy. In Policy Studies Journal, 8(4), 578-606
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi Offset, Yogyakarta.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. Jurnal USM Law Review, 3(1), 85-100. e-ISSN: 2621-4105. PDF
- Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. (1991). Kebijakan Publik sebagai Hubungan Antara Unit Pemerintah dan Lingkungannya. Dalam buku atau artikel yang membahas kebijakan public Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, 2003). Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia an. Dalam Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan intahan di Indonesia.



- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud, M.D. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.24914/jeb.v27i1.8729>
- Mitasari, D. A., & Syaflan, M. (2023). Evaluasi Kinerja Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk Optimalisasi Pengadaan melalui E-Purchasing. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Mei 2023. DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v1i2.696>.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. In *Policy Studies Journal*, 11(4), 468-490.
- Nugroho, A. (2009). "Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. VIII, No. 120, Hal. 60-67.
- Purbopranoto, Kuntjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Rahayu, Risca, and Tintin Sri Murtinah. 2022. "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden." *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship* 4(2): 57–68. DOI: <https://doi.org/10.55961/jpbj.v3i1.47>
- Ridwan, H.R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saidah, S. N., Ningtyas, S. S., Puspita Sari, P., dan Purwoko, S. D. (2023). *Analisis Penerapan metode e-purchasing pada pengadaan barang dan jasa*.
- Subarsono. (2009). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3S
- Supriaddin, N. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2597-4084.
- Tachjan, A. (2006). *Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan*. Bandung:
- Wahyudi, Andri. (2014). Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 11(3), 403–422. DOI: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>.
- Wahab, S. A. (1998). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Negara sebagai bagian dari keputusan politik. Dalam *Kebijakan Publik dan Implementasinya*. [PDF] Tersedia di: <http://repository.uin-suska.ac.id/4136/3/9.%20BAB%20II.pdf>



(2005). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta:

Yuhanah, & Rohana. (2021). Analisis Penerapan Metode E-Purchasing pada Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 125-140.

Peraturan dan Undang – undang

Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan E purchasing.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2021: Peraturan ini membahas Toko Daring dan E purchasing;

Peraturan Kepala LKPP No. 10 Tahun 2021: Peraturan ini mengatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2021: Peraturan ini membahas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022: Peraturan ini mengatur detail tentang penyelenggaraan E purchasing, termasuk bagaimana pelaksanaan e-purchasing pada E purchasing;

Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah;

Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan E purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024: Surat edaran ini berisi panduan penyelenggaraan e-purchasing katalog melalui metode Mini-Kompetisi untuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024: Surat edaran ini membahas implementasi E purchasing Versi 6;



1 (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);